



## **IMPLEMENTASI ANALYTICAL NETWORKING PROCESS (ANP) DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERKELANJUTAN**

**Chaidir Iswanaji,<sup>1</sup> M.Zidny Nafi' Hasbi,<sup>2</sup> Fitri Salekhah<sup>3</sup> & Mohammad Amin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Tidar

<sup>2</sup>Program Doktor, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

<sup>3</sup>Magister Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

<sup>4</sup>Pascasarjana Hukum Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email : [chais@untidar.ac.id](mailto:chais@untidar.ac.id), [mzidnynafihhasbi@gmail.com](mailto:mzidnynafihhasbi@gmail.com), [fitrisalekahah137@gmail.com](mailto:fitrisalekahah137@gmail.com),  
[aminwijaya01@gmail.com](mailto:aminwijaya01@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Zakat merupakan bagian dari instrumen keuangan Islam yang memiliki salah satu fungsi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut merupakan garis singgung yang paling signifikan terhadap tujuan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan (SDGs) yang merupakan bentuk komitmen global dalam memacu pertumbuhan ekonomi kearah lebih baik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dari organisasi pengelola zakat, akademisi, pemerintah dan praktisi. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* di mana objek kajian dalam penelitian ini adalah para pakar zakat yang ada di Kabupaten Jember. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ialah aspek sosial dengan *rater agreement*  $W=0,36444$ . Pendapat responden dalam menemukan solusi prioritas bervariasi, yaitu  $W=0,3032$ . Adapun strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan menunjukkan bahwa *key person* hampir semuanya sepakat ( $W=0,4538$ ). Ada empat strategi yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepedulian lembaga sosial masyarakat dan *stakeholder*; 2) Meningkatkan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan efisien; 3) Meningkatkan kualitas penegak hukum yang berkeadilan, dan 4) Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kepedulian terhadap UMKM masyarakat.

**Kata Kunci : Zakat, Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan, Implementasi Analytical Networking Process.**

### **ABSTRACT**

*Zakat is part of the Islamic financial instrument which has a function to alleviate poverty. This is the most significant tangent to the goal of sustainable community economic development (SDGs), which is a form of global commitment in spurring better economic growth. This type of research is a descriptive study of zakat management organizations, academics, government and practitioners. The technique used is purposive sampling technique in which the object of study in this study is the zakat experts in Jember Regency. The results of this study indicate that the priority of the implementation of zakat distribution in supporting sustainable community economic development is the social aspect with a ratio of agreement  $W = 0.36444$ . The opinion of respondents in finding priority solutions varied, namely  $W = 0.3032$ . The strategy in sustainable community economic development shows that almost all of them agree ( $W = 0.4538$ ). There are four strategies, namely: 1) Increasing the quality and quantity of concern for community social institutions and stakeholders; 2) Increasing disaster risk reduction comprehensively and efficiently; 3) Improve the quality of law enforcers who are just, and 4) Increase the field of employment and care for the community UMKM.*

**Keywords : Zakat, Sustainable Community Economic Development, Implementation of the Analytical Networking Process.**

## PENDAHULUAN

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pada negara dapat diukur dengan sedikitnya jumlah angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan kegagalan negara dalam mengatasi salah satu persoalan ekonomi masyarakat. Kemiskinan merupakan problematika yang kerap terjadi terhadap negara berkembang khususnya pada Negara Indonesia. Oleh karena itu menjadi hal yang penting pembahasan solusi dan penanggulangan kemiskinan pada semua negara. (Todaro, 1994)

Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah keterbatasan dan minimnya aset untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, hal tersebut masih sangat rendah (*acceptable*) masyarakat dapat merasakannya. Pada konteks ini, problematika kemiskinan erat berkaitan dengan terbatasnya lahan suatu pekerjaan, pendidikan yang rendah serta tidak adanya modal untuk dapat membuka usaha sehingga berdampak terhadap banyaknya pengangguran. (Kurnianto, 2004)

Studi komprehensif yang dilakukan oleh Bank dunia yaitu memperkirakan 1,2 miliar jumlah penduduk warga negara dunia yang berada pada garis kemiskinan dengan berbagai faktor terutama pada sektor ekonomi. Hal ini menjadikan pembangunan ekonomi negara menjadi sulit untuk maju dan berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang masuk kedalam urutan ke-9 negara sebagai penduduk miskin. Menurut UNDP Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai angka kemiskinan yang masih tinggi dan secara terus menerus mengalami peningkatan. Tingginya angka kemiskinan di

Indonesia menjadi bahan evaluasi dan pembahasan untuk mencari instrumen yang tepat dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbagai bentuk kebijakan yang ada seperti faktor sektoral, moneter dan fiskal ataupun kebijakan lainnya ternyata masih belum efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. (World Bank Institute, 2004).

Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara membuat barang komoditi dan jasa yang dapat di produksi kepada masyarakat. Oleh karena itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam negara merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi pada masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi secara fisik dapat di lihat dengan adanya penambahan jumlah produksi industri, peningkatan infrastruktur, meningkat dan bertambahnya jumlah aset serta meningkatkannya produk manufaktur. (Al-Qardawi, Fiqih az-Zakah, 1980)

Upaya dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan hendaknya dapat di mengerti dan di pahami sebagai persoalan dunia secara global. Agama Islam dalam hal ini, menawarkan solusi kepada manusia yang sifatnya universal untuk mewujudkan kehidupan sejahtera secara bersama. Artinya ajaran agama Islam mengajarkan prinsip hidup bagi manusia agar menjadi manusia rahmat bagi manusia dan alam semesta. Salah satu upaya yang dilakukan agama Islam dalam mewujudkan kesejahteraan ummat dan pemerataan pembangunan ekonomi sangat terukur dan detail yaitu dengan dasar saling membantu antara sesama, masyarakat yang memiliki kelebihan kekayaan dapat memberikan sebagian kecil hartanya yaitu berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada orang miskin. (Arthur, 2007).

Kesejahteraan hidup adalah sebuah kondisi yang di harapkan oleh setiap penduduk negara termasuk dalam dalam hal ini adalah negara Indonesia. Tetapi pada kenyataannya tidaklah semua warga negara dapat merasakan kesejahteraan hidup karena masih adanya berbagai ketimpangan masalah yang belum bisa di atasi secara maksimal berupa kesenjangan sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kesenjangan antar daerah, kawasan dan infrastruktur yang tidak merata. (Yasid, 2008)

Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial memiliki dua pengertian, pertama pembangunan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial bersifat holistik artinya ketika kebutuhan pokok manusia sudah terpenuhi maka spiritual keimanan akan menjadi kuat. Pada dasarnya manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa di mana keduanya perlu di perhatikan dan di penuhi agar menjadi seimbang dalam menjalani hidup. Di samping itu juga, manusia mempunyai dimensi sebagai makhluk individual dan sosial. Ini menunjukkan manusia akan dapat merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan ketika dirinya dan lingkungan sosialnya sudah terpenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan hidup yang lain. Kedua, pembangunan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial merupakan suatu hal yang perlu dilestrasikan secara bersama sebagai wujud untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karna itu, jika kondisi ini tidak tercapai maka nilai kehidupan masyarakat tidak akan memiliki nilai (*valuable*). (Ghazali, 2009)

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terletak pada pada 5 poin dan ketika 5 poin ini dapat terealisasi dengan baik maka

pembangunan pada negara akan terwujud dengan baik juga. Pertama menjaga agama, kedua menjaga jiwa, ketiga menjaga intelektual, keempat menjaga keturunan dan kelima menjaga harta (*wealth*). (Smith, 2008). Selanjutnya indikator pembangunan ekonomi terdiri dari peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang maju maka perlu melakukan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan memberi pelatihan kewirausahaan serta modal untuk usaha. (Todaro, 1994)

Kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk, jika di lihat dari persentase Maret 2019 penduduk miskin di Indonesia tercatat 9,41 persen menurun pada tahun sebelumnya menjadi 9,82 persen. Meski demikian, kemiskinan masih menjadi persoalan Negara di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2019 khusus di pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan nomor 3 di negara Indonesia. Sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Selanjutnya Smith (2008), menjelaskan keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat pada setiap negara dapat diukur dengan tiga aspek yaitu: (1) meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk mencari jalan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok (*sustenance*), (2) terjaminnya rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat sebagai makhluk Allah SWT dan (3) meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memilih hidup (*freedom from servitude*) yaitu kesejahteraan hidup dalam segala bentuk tatanan yang pada dasarnya merupakan hak asasi manusia. Kemampuan individu atau rumah tangga untuk dapat keluar dari kemiskinan juga tergantung dari penghasilan pekerjaan mereka. Manfaat

dan dampak zakat bagi penerima zakat yaitu, pertama zakat merupakan seruan spritual agama sebagai bentuk cerminan dari keimanan seorang muslim. Kedua sebagai sumber keuangan, di mana orang yang mengeluarkan zakat yaitu orang muslim tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ketiga zakat secara empirik dapat menghapus dan meminilisir kesenjangan sosial masyarakat serta menjadi *redistribusi* aset negara. (Al-Qardawi, Hukum Zakat Cet. 10, 2007)

Menurut Catatan pada *Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia pada urutan ke 6 terburuk di seluruh dunia. Demikian juga pada aspek sains dan pendidikan. Menurut hasil penelitian *Trends in Mathematics and Science Study* (TIMSS) pada tahun 2018, ia menyatakan bahwa Indonesia meraih rengking pada deretan ke 45 dari 48 negara. Ini menunjukkan bahwa kualitas sains dan pendidikan yang ada pada negara Indonesia sangat buruk dan rendah secara kualitas. Pemasalahan pro kontra terhadap gender menjadi permasalahan yang penting di Indonesia, hal ini membuat ketimpangan sosial pada masyarakat khususnya pada kalangan perempuan yang selalu di marjinalkan oleh kelompok tertentu. Tingkat kesehatan pada penduduk negara Indonesia sangat buruk karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menerima jaminan kesehatan (BPJS) dari pemerintah. (Burhanuddin, 2017)

Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan doktrin bahwa membantu dan saling tolong menolong sesama manusia merupakan perbuatan yang mulia dan bagi para penganut ajaran agama Islam akan dapat jaminan hidup bahagia kelak nanti diakhirat.

Agama Islam juga hadir secara fungsional dalam rangka untuk mengatasi dan memberi solusi terhadap segala permasalahan manusia baik yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, tujuan agama Islam ini sesuai dengan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan hidup sosial serta menghilangkan kemiskinan *no poverty*. (Azizy, 2004)

Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu adanya solusi yang tepat dan *super power* sehingga dapat meminimalisir ketimpangan baik aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan sains, kesehatan yang buruk dan juga pelestarian lingkungan yang tidak sehat. *Suntainable Development Goals* (SDGs) merupakan kerangka pembangunan ekonomi yang baru dengan tujuan untuk mengakomodasi semua perubahan pada semua negara. Dengan demikian *Suntainable Development Goals* (SDGs) sangat tepat sebagai instrumen baru dalam mengatasi permasalahan global tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menyetujui untuk menjadi *stakeholder* dan ikut serta dalam melakukan perjanjian dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk melaksanakan dan merealisasikan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara bersama. (Trihano, 2015)

Melalui BAPPENAS negara terbesar yang ada di ASIAN menyatakan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat secara berkesinambungan dan mewujudkan kesejahteraan hidup pada setiap warga negara yaitu dengan menjamin adanya

keadilan yang sama, kualitas hidup yang sehat, pendidikan yang merata, kesehatan lingkungan dan jaminan keadilan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. (Afzalur, 2001)

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah agenda yang di program dalam jangka waktu yang sangat panjang yaitu sampai pada tahun 2030 sebagai pembangunan berkelanjutan bersama yang di buat untuk semua negara dan dapat persetujuan dari berbagai pihak kepala negara di forum resolusi (PBB). Pembangunan berkelanjutan merupakan program bersifat global yang berkaitan dengan tujuan agama Islam. Tujuan dan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) tidaklah bisa berjalan dan berdiri sendiri oleh karena itu perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu serta adanya dukungan dari sektor pemerintah dan lembaga perekonomian lainnya untuk menjadi *stakeholder* dalam merealisasikan program pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara bersama. (Trihano, 2015)

Bukti adanya hubungan zakat untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu adanya Undang-undang No. 23 tahun 2001 mengenai "Pengelolaan Zakat" dimana zakat sebagai dimensi pranata agama berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Adapun salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan orientasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi yang sampai saat ini di usahakan oleh pemerintah untuk mencarikan solusi. (Trihano, 2015)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pusat yang di bentuk oleh pemerintah untuk pengelolaan dana zakat. Oleh karna itu, BAZNAS memiliki peran penting untuk

ikut berpartisipasi dan bekerjasama dalam mensukseskan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). BAZNAS Kabupaten Jember yang berada di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menindaklanjuti kerjasama BAZNAS Pusat dengan PBB dan UNDP (*United Nation For Development Program*). Pemerintah pusat dalam hal ini menjadikan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai panduan dalam menyelenggarakan dan merealisasikan agenda pembangunan berkelanjutan serta berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan berbagai pihak *stakeholder*.

Dapat di pahami dalam konteks ini, bahwa *grand desain* utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah *no proverty* dan mendorong kesejahteraan hidup sosial serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk adanya lembaga-lembaga sosial Islam sebagai bentuk upaya dalam menanggulangi masalah tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka dana zakat yang di kelolah oleh lembaga BAZNAS tidak hanya dapat di gunakan dan terbatas pada kegiatan sebagai barang konsumtif melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. (Zuhri, 2012)

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah di sepakati (*māliyyah ijtimā'īyyah*) yang memiliki posisi strategis, baik di lihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang

Allah SWT mewajibkan kepada pemilik harta, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhudin, 2002)

Hakikatnya, semua yang di hasilkan oleh orang muslim dari jerih payah usahanya, apapun sumbernya ada hak dari sebagian ummat muslim lainnya. Sebagian harta yang mereka miliki harus di berikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti lain harta tersebut harus di keluarkan zakatnya, akan tetapi di sisi lain juga terdapat harta yang tidak terkena kewajiban zakat. Harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu harta yang belum mencapai *nishab* atau belum memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat (Hafidhuddin, 2002).

#### **b. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan pada setiap negara yang tertuju pada lahan, kota, bisnis, dan ekonomi masyarakat dengan berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan. (Anung, 2015).

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development goals* merupakan salah satu faktor yang harus di hadapi oleh setiap negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu fokus pada memperbaiki kehancuran lingkungan, kesehatan,

pendidikan dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan yang berkeadilan sosial tanpa adanya ketimpangan pada setiap warga negara. (Abdullah et all, 2012).

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan rencana aksi untuk ummat manusia, planet dan kemakmuran yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang sangat luas tanpa ada yang di marginalkan oleh kelompok tertentu. Singkatnya adalah pembangunan berkelanjutan (SDGs) di rancang untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi pada semua negara merupakan tantangan yang ekstrim secara global. (Aedy, 2015)

*Post-2015*, juga di kenal dengan sebutan *sustainable development goals* (SDGs) di agendakan untuk 15 tahun sampai tahun 2030, merupakan salah satu program kerja yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan negara di seluruh dunia. Konsep *sustainable development goals* (SDGs) dapat di jadikan sebagai kerangka dan program pembangunan baru yang berorientasi untuk mengakomodasi terhadap semua bentuk perubahan yang terjadi setelah 2015, *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 tentang isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security* dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. (Ahmad et all, 2013)

Berikut 17 agenda pembangunan berkelanjutan:



Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

**c. Analytical Network Process (ANP)**

*Analytical Network Process* (ANP) merupakan pengembangan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). ANP merupakan teknik pengambilan keputusan terhadap suatu masalah. ANP merupakan pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja secara umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan dengan menggunakan jaringan tanpa harus menetapkan level seperti AHP. ANP adalah salah satu metode yang mampu mempresentasikan tingkat kepentingan (prioritas) berbagai pihak atau elemen dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lain. (Ascarya, 2005)

**d. Penelitian Terdahulu**

Hasanah (2017), melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara komprehensif dengan menggunakan studi pustaka atau (*Library Reseach*) sebagai pendekatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-undang pengumpulan zakat no 38 tahun 1999. Seiring perkembangan

teknologi, kini pengumpulan dan pembayaran zakat telah semakin mudah di lakukan.

Khanifa (2018), melakukan penelitian menggunakan pendekatan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif. Hasil ini penelitian ini menunjukkan adanya relevansi antara tujuan ZISWAF dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Secara garis besar gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan dan kebersihan lingkungan. Kelemahan penelitian ini terletak pada metodologi, di mana pengambilan data tidak di sebutkan oleh peneliti sebelumnya.

Syarifuddin (2019), menulis artikel dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan melakukan pengolahan input dan output variabel. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan kantor dengan membagi divisi karyawan BAZNAS menjadi bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan di BAZNAS cukup baik, baik

dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan salah satu bentuk jaringan ANP yaitu jaringan umum. Jaringan umum adalah jaringan yang tidak memiliki bentuk khusus. Bentuk jaringan ini bisa sangat sederhana atau sangat kompleks yang melibatkan banyak claster, depedensi, dan *feedback*. Setelah terbentuk kerangka ANP, tahapan yang harus dilakukan selanjutnya adalah kuantifikasi model dan menganalisis data. Setelah model dibuat dalam *software superdecision* dilakukan penyusunan koesioner ANP. Kuesioner dibuat sesuai dengan kerangka ANP dengan skala numerik.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan diteliti. Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan secara

*purposive sampling* (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman dan pengetahuan responden terhadap permasalahan zakat pada pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP). *Analytic Network Process* (ANP) merupakan satu dari metode *multiple criteria decision making* (MCDM) yang dikembangkan Thomas L Saaty dengan tujuan untuk mengembangkan pengukuran hubungan atau relevansi dan juga untuk memperoleh skala prioritas pada pandangan individu. Dalam hal ini mencari skala priortitas kinerja zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Jember. Dalam analisis ANP, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah membuat kerangka kerja ANP (Kontruksi model) ntuk memahami masalah yang diperoleh dan *review* literatur, kuesioner, dan *indepth* interview. (Saaty, 2005)

Berikut kerangka konstruk model cara mencari penilai prioritas pada *Analytic Network Process* (ANP):

**Tabel 1. Skala Linkert**

Skala Numerik (Intensity of Importance)	Skala Verbal (Definition)
9	Mutlak sangat penting
7	Sangat penting
5	Lebih penting
3	Sedikit lebih penting
1	Nilai tengah



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil analisis dari hasil olah *analytic network process* (ANP) data kuesioner para *key person* akan dibahas dari hasil totalnya. Berdasarkan hasil dari olah data menggunakan *Software Super Decisions* 3.20 dan *Software Excel* 2010 maka didapatkan hasil perhitungan *geometric mean* dan *rater agreement* (W) dari setiap aspek.

Berdasarkan hasil dari olah data beberapa aspek terdapat empat masalah yang teridentifikasi oleh *key person*, terkait masalah yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. *Key person* sepakat empat aspek masalah dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan dengan nilai *rater agreement* sebesar  $W = 0,6071$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa masalah prioritas yang harus segera dibenahi adalah masalah utama yaitu: 1) Sosial 2) Lingkungan 3) Hukum dan tata kelola 4) dan Ekonomi. Terkait dengan aspek solusi, angka persetujuan cukup rendah berarti pendapat responden bervariasi yaitu  $W = 0,3023$ . *Key person* setuju dengan solusi prioritas dari empat masalah pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ialah aspek sosial. Solusi ini menjawab permasalahan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

Kajian permasalahan dan solusi menentukan strategi prioritas yang harus diambil. Secara keseluruhan, *key person* hampir semua sepakat ( $W = 0,4583$ ) strategi pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Jember Jawa Timur. Strategi ini akan mendukung solusi dari permasalahan aspek-aspek sebelumnya seperti sosial lingkungan, hukum dan tata kelola dan

ekonomi. Keempat strategi ini yaitu: 1) Meningkatkan kualitas kepedulian lembaga sosial masyarakat dan *stakeholder* 2) Meningkatkan pengurangan resiko bencana 3) Meningkatkan kualitas penegak hukum yang berkeadilan 4) Meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan UMKM masyarakat.

Bagian Dalam pelaksanaannya, distribusi zakat di BAZNAS dapat memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Besarnya potensi penerimaan menjadikan zakat sebagai salah satu solusi strategis bagi pelaksanaan *sustainable development goals* (SDGs) di berbagai belahan dunia, khususnya dunia Islam. Program SDGs yang bisa dibantu menggunakan dana zakat antara lain pemberantasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan, pemberian pendidikan yang layak, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi, pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, perubahan iklim, serta kemitraan. Untuk optimalisasi pelaksanaannya, perlu diatur garis-garis acuan yang mendukung pembangunan global namun tetap berada dalam koridor syariah. Dalam kontribusi zakat untuk tujuan pembangunan global, perlu dibangun jembatan yang menghubungkan fiqih pemberdayaan zakat berdasarkan *asnaf* dengan gagasan pembangunan oleh SDGs. (Umam, 2013)

Kesesuaian Islam terhadap standar-standar nasional dan internasional seperti keadilan, kemanusiaan, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik. Islam juga mengatur keseimbangan antara ibadah dan muamalah, dunia dan akhirat, serta pribadi dan kelompok. Zakat dan SDGs, akan dapat bersinergi karena keduanya memiliki tujuan yang sama. Pemerintah dan ulama juga mendukung

pendayagunaan zakat untuk pencapaian SDGs. Hal ini tercermin dari salah satu fatwa MUI yang menyatakan bahwa harta zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dapat didayagunakan untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sebagai salah satu tujuan SDGs.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, zakat di Indonesia memiliki potensi kontribusi besar dalam perekonomian. Pelaksanaan SDGs sebagai alat untuk mencapai Agenda pembangunan nasional dapat dilengkapi dengan dukungan pelaksanaan zakat. Sejak Indonesia menjadi penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni 85 persen dari total penduduk di Indonesia atau sekitar 216,6 penduduk. Dengan demikian dana zakat dapat dikumpulkan secara optimal dari umat Islam. Hal tersebut juga dapat digambarkan dari meningkatnya nilai zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) sejak tahun 2002 hingga 2015. (Fikri, 2013)

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pada 2015 terjadi peningkatan dalam pengumpulan zakat di Indonesia dari 240,17 juta dolar AS atau sekitar Rp. 3,19 triliun (kurs Rp. 13.300 per dolar AS). Bahkan, pada 2014, menjadi 269,29 juta dolar AS atau sekitar Rp. 3,58 triliun. Distribusi zakat di Indonesia tersalurkan di beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sektor sosial. Di antara sektor-sektor tersebut, sektor sosial memiliki alokasi tertinggi di tingkat nasional, dengan hampir setengah dari total dana zakat, yaitu 41,27 persen atau hampir Rp. 1 triliun. Sekitar setengah dari itu, khususnya 20,35 persen atau hampir Rp. 500 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Kemudian diikuti sektor ekonomi dan dakwah dengan alokasi masing-masing 15,01 persen atau sekitar Rp. 340 miliar dan 14,87 persen atau sekitar Rp. 330 miliar. Selain itu, proporsi terkecil dari distribusi zakat yaitu 8,5

persen atau sekitar Rp. 200 miliar dialokasikan di sektor kesehatan. Dengan potensinya menjadi semacam peredam tekanan atau "*shock absorber*" terhadap guncangan eksternal, keuangan syariah dapat membantu dalam mencapai SDG-8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dan pertumbuhan lainnya terkait SDGs. Keuangan Islam dinilai dapat berperan dalam realisasi tujuan yang berkaitan dengan SDG-1 (tidak ada kemiskinan), SDG-2 (tidak ada kelaparan), SDG-3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDG-5 (kesetaraan gender), SDG-8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dan SDG-16 (perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat). (Erik, 2014)

Instrumen redistributif seperti zakat, wakaf dan sedekah, memiliki memainkan peran penting dari perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan dengan cara yang bermartabat dan mengarahkan ke inklusi keuangan dan sosial yang lebih luas. Potensi mobilisasi sumber daya yang kuat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, keuangan syariah dapat membuka jalan bagi realisasi tujuan yang terkait dengan SDG-6 (air bersih dan sanitasi), SDG-7 (energi yang terjangkau dan bersih), SDG-9 (industri, inovasi dan infrastruktur), dan SDG-11 (kota berkelanjutan dan masyarakat). (Husain, 2018)

*Islamic Development Bank* dalam salah satu laporannya mendefinisikan kemiskinan dengan merujuk kepada definisi *International Labour Organisation* (ILO). Pada dasarnya kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kompleksitas dari masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut kemiskinan itu sendiri, melainkan juga berdampak dan merusak terhadap seluruh aspek kehidupan. Kemiskinan dapat

berimplikasi terhadap tingkat kesehatan, sarana prasarana pendidikan, pengangguran. Dampak terbesar dari kemiskinan yaitu terabaikannya kesejahteraan umat atau masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan umat manusia. (DEKS Bank Indonesia, 2016)

Ekonomi Islam sebagai ekonomi yang bersentuhan dengan nilai-nilai transendental al-Qur'an dan Hadist menawarkan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui instrumen zakat yang merupakan salah satu item terpenting dalam filantropi Islam. Hal tersebut dipandang dapat membantu berbagai kegiatan umat serta dapat mengatasi masalah kemiskinan. (Fitriasari, 2013)

Zakat dalam Agama Islam mempunyai dua dimensi yaitu ibadah (*hablumminallah*), dan dimensi sosial ekonomi (*hablumminannas*). Dalam dimensi religi, zakat merupakan kewajiban perintah Allah SWT. Sedangkan dalam dimensi sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup. Zakat juga tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan disuatu negara. Inti dari semangat Islam dalam memecahkan dilema kemiskinan adalah bersifat inklusif dan harus melekat pada pengembangan keuangan Islam. (Ubaidillah, 2008)

Zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan pengaruh signifikan

terhadap makro ekonomi. (Norvadewi, 2012) melalui konsep zakat dengan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), diharapkan dapat memberikan solusi baru terhadap implementasi program BAZNAS Kabupaten Jember. Sebagai bagian elemen perekonomian Islam, zakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peranan institusi zakat dalam aktivitas ekonomi tidaklah kalah penting dengan fungsi institusi keuangan Islam yang lain. Eksistensi institusi zakat yang ada diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu Negara. Tujuan institusi zakat dalam perekonomian di Indonesia diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan menjadi jaminan sosial serta pelayanan yang efektif.

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahiq* secara konsumtif. Artinya pemberian dana zakat dimaksudkan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dengan berorientasi pada aspek produktif dimaksudkan agar para *mustahik* bisa berproduksi secara mandiri dengan bermodalkan dana zakat yang diterimanya. Dengan demikian zakat dapat berkontribusi bagi jaminan sosial dan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin sekaligus untuk memperkuat kemandirian ekonomi dari komunitas Muslim. Penyaluran dana zakat dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan daya beli individu dan

akhirnya membantu pada pengentasan kemiskinan.

Menurut Khaf (1997) secara ekonomi bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahik akan meningkatkan daya beli atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi serta dapat menambah perekonomian Negara secara agregat. Zakat dapat diarahkan untuk menciptakan pemerataan bagi masyarakat, sehingga taraf perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Zakat tidak hanya dapat bergerak dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam menghadapi masalah pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai perbaikan yang seimbang dan berkelanjutan dalam kesejahteraan material dan non-material manusia serta menggambarkan pembangunan sebagai proses multidemensi yang melibatkan peningkatan kesejahteraan melalui kemajuan, reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial melalui peningkatan spritual sesuai dengan pandangan holistik ajaran Islam. Dalam konteks ini keuangan Islam memainkan peran mendasar dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Islam dan pembangunan sangatlah sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan Islam telah mempromosikan distribusi ekonomi yang adil dan menjunjung tinggi hak orang miskin melalui instrumen zakat dan bentuk amal lainnya. Upaya penyalarsan ini, jika diterapkan dengan benar dan optimal, maka kaum Muslim akan mudah untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan pada umumnya berpusat pada faktor material seperti pendidikan, kesehatan,

dan pendapatan. Dalam Islam, kesehatan, pendidikan, pemerataan pendapatan, keadilan sosial, perumahan yang nyaman, lingkungan bersih, hak asasi manusia merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab permasalahan dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Jember, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan yaitu; Pertama, strategi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kepedulian lembaga sosial masyarakat yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada mereka yang tergolong orang miskin. Untuk pemberian harta ini bisa melalui lembaga sosial masyarakat seperti BAZNAS, LAZ dan lain sebagainya. Kedua, strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan efisien. Ketiga, meningkatkan kualitas penegak hukum yang berkeadilan juga dapat menjadi strategi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Keempat, strategi terakhir adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan kepedulian terhadap UMKM masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, BAZNAS dapat mewujudkan program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan dengan melihat kondisi dari ketersediaan dana yang ada di lembaga BAZNAS dan juga dengan beberapa program BAZNAS yang berkaitan dengan sosial masyarakat, hal tersebut bisa mejadi maksimal dalam merealisasikan program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan (SDGs)

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh distribusi zakat dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan

(SDGs) di Kabupaten Jember Jawa Timur sangat signifikan akan tetapi tidak semua program dapat terealisasi. Pengaruh distribusi zakat dapat mendukung program pembangunan masyarakat berkelanjutan dalam bidang sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola dan ekonomi namun belum maksimal disebabkan dana zakat masih minim. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ialah aspek sosial dengan *rater agreement*  $W=0,36444$ . Pendapat responden dalam menemukan solusi prioritas bervariasi, yaitu  $W=0,3032$ . Adapun strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan menunjukkan bahwa *key person* hampir semuanya sepakat ( $W=0,4538$ ). Ada empat strategi yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepedulian lembaga sosial masyarakat dan *stakeholder*; 2) Meningkatkan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan efisien; 3) Meningkatkan kualitas penegak hukum yang berkeadilan, dan 4) Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kepedulian terhadap UMKM masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Naziruddin., Mohd Yusop, Mohd Mahyudi., Hj. Awang, Che Omar. 2012. A Technical Note on The Derivation of Zakat Effectiveness Index (Zein). *International Journal of Economics Management and Accounting*, 20(1), p. 75-86.

Afzalur, R. 2001. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*. PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

Ahmad, Nisar., Batti, Kausar Abbas., & Arshad, Muhammad Usman. 2013. Economic Growth and Human Development in Islam. *Al-Qalam*, 2, 68-76.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1980. *Fiqih az-Zakah*. Muassassah al-Risalah. Beirut.

Al-Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat Cet. 10*. PT. Mitra Kerjaya Indonesia. Jakarta.

Anung. 2015. *Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Arthur. 2007. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.

Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Bank Indonesia.

Azizy, A. Q. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Burhanuddin. 2017. Permasalahan Dunia di Era Industri. *Ekonomi & Keuangan Vol. 2*, 67.

DEKS Bank Indonesia. 2016. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor. Jakarta.

Erik. 2014. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*. Putra Media Nusantara. Surabaya.

Fikri. 2013. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Fitriasari. 2013. Rumah Zakat. *Ekonomi Islam dan Hukum Vol 4*, 23.

Ghazali, Imam. 2009. *Teori Ekonomi Islam*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press. Jakarta.

- Hasanah, Miftahul. 2017. Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), p. 112-121
- Husain. 2018. *Pengaruh ZIS dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Priode 1998-2010*. Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Khaf. 1997. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Khanifa, Nurma Khusna. 2018. Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), p. 149-168.
- Kurnianto. 2004. *Denimika Permasalahan Ekonomi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Norvadewi. 2012. Analysis of Cash Waqf Fund Management in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Method Approach. *ASEAN International Conference on Islamic Finance (AICIF)*. Vol 2, 87.
- Saaty, T. L. 2005. *Theory and Applications of the Analytic Network Process*. PA: RWS Publications. Pittsburgh
- Smith. 2008. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Syaifuddin, Tsalia. 2019. Implementation of Data Envelopment Analysis (DEA) In Measuring The Efficiency Zakat Fund Management. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 1(1), p. 50-57.
- Todaro, Mechael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Trihano. 2015. *Pembangunan Berkelanjutan*. CV. Sagung Seto. Jakarta.
- Ubaidillah. 2008. Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir Dengan (Sustainable Development Goals). *Pembangunan Ekonomi Vol. 2*, 39.
- Umam. 2013. *Dinamika Permasalahan Ekonomi*. Deva Press. Yogyakarta.
- World Bank Institute. 2004. *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi Terjemahan. Semarang.
- Yasid. 2008. *Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi*. Azka Publisher. Jakarta.
- Zuhri, S. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. Semarang.